



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIA FAPRIYANIE
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 784094

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.085.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/320 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/141 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 501 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
5. Tanah Seluas 606 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 551.000.000

1. MOTOR, KAWASAKI SPM R 2 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV CRV 1.5 TCPRESTIGE / JEEP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. MOBIL, HYUNDAI I. 20.1.4 4X2 MT / MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 88.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 820.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 706.506.433



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.162.606.433
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.162.606.433

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.